

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan sebagai rujukan dalam penelusuran yang terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1	<i>Syifaul Muhash Shonah (2013)</i>	Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas (Studi Pada Bank Sampah Pitoe Kelurahan Jambangan, Surabaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan yang terjadi karena faktor manusia. Antara lain disebabkan karena kurangnya dukungan dan fasilitasi oleh instansi terhadap pengelolaan bank sampah secara khusus. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi dan monitoring lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas ini sendiri.
2	Mahbuban MS (2016)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan

		Bank Sampah (Studi Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta)	yang terjadi melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan yang terjadi karena faktor manusia. Antara lain disebabkan karena kurangnya dukungan dan fasilitasi oleh instansi terhadap pengelolaan bank sampah secara khusus. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi dan monitoring lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas ini sendiri.
3	Diana Fildzah Aprilianti (2014)	“Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Smapah” (Studi di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)	Hasil dari penelitian ini adalah adanya Program Bank Sampah Bintang Mangrove memberikan dampak ekonomi yang positif dalam menambah penghasilan tetapi tidak pada jumlah tabungan yang dimiliki nasabah hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran nasabah akan menabung. Dampak sosial berdampak positif bagi masyarakat adanya perubahan pola pikir terhadap pemilahan sampah, kini masyarakat mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya, hal ini pun dapat dikatakan bahwa masyarakat turut

			mengaktifkan program Bank Sampah Bintang Mangrove. Kini masyarakat mampu menjaga kelestarian lingkungan. Pola pikir masyarakat berubah mengenai pekerjaan pemulung kini masyarakat tidak menganggap rendah pekerjaan pemulung
4	Syafa'atur Rofi'ah (2013)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan an Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah meliputi sosialisasi, pemetaan wilayah, perencanaan, pelatihan, dan proses penanganan di tempat, proses pengumpulan sampah, proses pengangkutan sampah, proses pengelolaan sampah. Manfaat yang dirasakan masyarakat Suronatan, mereka sangat terbantu dengan adanya Bank sampah karena bagi mereka sampah yang biasanya dibuang sia-sia menjadi barang yang bernilai ekonomis, menambah perekonomian keluarga, menambah silaturahmi antar masyarakat satu dengan yang lain.
5	Pitri Nurhidayah (2017)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Dusun Serut memiliki

		Kabupaten Bantul	<p>kegiatan yang meliputi sosialisasi bank sampah, penabungan sampah, pemilihan sampah, pelatihan keterampilan dan evaluasi yang dilakukan seminggu sekali akan tetapi masih terdapat kekurangan antara lain rencana-rencana tersebut belum diikuti oleh seluruh anggota bank sampah; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Dusun Serut yaitu kinerja pengurus yang tidak maksimal, pembagian kerja yang kurang spesifik, serta partisipasi masyarakat yang kurang; 3) Dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Dusun Serut pada aspek lingkungan cukup memberikan dampak yang baik yaitu terlihat dari semakin bersihnya lingkungan, pada aspek ekonomi cukup untuk memberikan penghasilan tambahan bagi anggota yang aktif, dan pada aspek sosial semakin mengakrabkan antar masyarakat.</p>
--	--	------------------	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta focus pembangunan pada manusia. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehiduannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni “People-centered, participatory, empowering, and suistable. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan social, ekonomi, budaya dan politik. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat, dan proses transformasi ini harus digerakkan sendiri oleh masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (2002), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan social ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.

3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya, yaitu pengenalan setia manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus berkembang.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang yang sporadik. Pengertian pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan berbagai pendekatan. Menurut Rapparot dan Suharto (1998:3); “Pemberdayaan menunjuk pada usaha relokasi sumber daya melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”.

Menurut Ife dalam Edi Suharto (2009:59) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

- a. *Power over personal choices and life choices* : kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup,

kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.

- b. *Power over the definition of need* : kekuasaan dan pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
- c. *Power of ideas* : kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. *Power over institution* : kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti ; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.
- e. *Power over resources* : Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan hidup.
- f. *Power over economic activity* : kekuasaan atas reproduksi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa.
- g. *Power over reproduction* : kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai dan perilaku.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Menurut Sunyoto Usman dalam Abu Huraerah (2008:87), tujuan pemberdayaan adalah memperkuat *community self-reliance* atau kemandirian. Ife (1995) dalam Edi Suharto (2009:58) berpendapat bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah tidak beruntung. Menurut Edi Suharto (1987) dalam Abu Huraerah (2008:89), pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal . Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat struktural yang menghambat.
- b. *Empowering*, merupakan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
- d. *Supporting*, yakni pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. *Fostering*, yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

2.2.3 Dimensi Ukuran Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dari pendekatan komprehensif maupun intermental. Pada pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka , serta pengarahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha,

lembaga social kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh maupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

Pada pengertian kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam waktu yang sama. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya terpusat pada sector ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga disisi lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang ini, ukurannya telah banyak dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta huruf, angka partisipasi sekolah untuk SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Selain itu, Bappenas bersama BPS juga sedang mengembangkan angka indeks kesejahteraan rakyat yang menggabungkan indicator ekonomi, kesehatan dan pendidikan dalam suatu angka indeks. Dalam dunia internasional, indeks seperti ini telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan nama Human Development Index (HDI).

2.2.4 Indikator Pemberdayaan

Menurut Kiefer (1981) dalam Edi Suharto (2009:63) pengertian pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan social politik, dan kompetensi partisipatif. Partons et.al (1994) seperti yang dikutip oleh Edi Suharto (2009:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut

untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indicator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan social diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto mengembangkan delapan indicator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan cultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : “kekuasaan didalam” (*power within*), “kekuasaan diluar” (*power to*), “kekuasaan diatas” (*power over*), dan “kekuasaan dengan” (*power with*).

2.2.5 Strategi Pemberdayaan

Parsons et.al (1994) dalam Suharto (2009:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu anatar pekerja social dan klien dalam pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan social dapat dilakukan melalui kolektivitas, dalam arti mengkaitkan dengan sumber atau system lain diluar dirinya.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (*empowerment setting*) yaitu : mikro, mezzo, makro.

1. Pendekatan Mikro : pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervenrion. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*)

2. Pendekatan Mezzo : Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan Makro : Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (LAge-sytem strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.2.6 Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat bagi lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Kartasasmita dan Mashoed (2004:46), upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap, antara lain:

1. Menciptakan susasana atau iklim tolaknya memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (Empowering). Dalam rangka ini perlu langkah-langkah yang lebih positif, selain menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin

berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, drajat kesejahteraan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (*protecting*) Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti menutupi interaksi, karena hal ini justru akan menglulaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek upaya pembangunan sendiri.

2.3 Sampah

2.3.1 Pengertian Sampah

Bedasarkan UU No. 18 Th 2008 Tentang Pengolahan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra:2006).

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah

makan, industry, atau aktivitas manusia lain. Bahkan, sampah bisa berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai (Nurhidayat:2010).

Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia, yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna (R.I:1996).

Dari beberapa paparan diatas tentang pengertian sampah dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang sisa hasil pakai yang dihasilkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup setiap hari.

2.3.2 Jenis sampah

a. Sampah organik atau dapat diurai (*degradable*)

Sampah Organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk sampah organik kering diantaranya, kertas, kayu atau ranting pohon dan dedaunan kering (Nurhidayat:2010).

b. Sampah anorganik atau tidak terurai (*undegradable*)

Sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa berasal dari bahan yang bisa diperbarui dan bahan berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (*recycle*) ini misalnya bahan yang terbuat dari plastic dan logam (Nurhidayat:2010)

2.3.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan

akhir. Diantara kegiatannya pengelolaan sampah meliputi penanganan ditempat, pengumpulan sampah, transfer dan transport, serta pengolahan

1. Penanganan di Tempat (*on place Handling*)

Penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap-tahap yang meliputi pemilihan, pemanfaatan kembali dan daur ulang dengan tujuan untuk mereduksi besarnya timbunan sampah.

2. Pengumpulan (*collection*)

Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ketempat pembuangan sementara, dan pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua, yaitu pola individual dan pola komunal.

3. Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pmindahan sampah dari TPS menuju TPA dengan menggunakan truk sampah.

4. Pengolahan (*processing*)

Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya, berbagai alternative yang tersedia dalam proses pengolahan sampah diantaranya,

- a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Pembuatan kerajinan daur ulang, yaitu megubah sampah kering (anorganik) menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.
- c. Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio (Sejati:2009)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk melihat permasalahan penelitian secara utuh, digambarkan dalam Model Input-Output Pemberdayaan Masyarakat Jambangan RT 07 RW 03 sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pemberdayaan Masyarakat Jambangan RT 07 RW 03.



